



FOKUS

# Perkebunan

Edisi 1 / Januari - Maret 2019

Bersama Membangun Perkebunan

## Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



## Kegiatan Pengembangan Kebun Karet Rakyat Tahun Anggaran 2019

# Daftar Isi

Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	3
Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	3
Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) .....	4
Konsolidasi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	6
Pertemuan Koordinasi Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3) .....	8
Tabel Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2019 .....	9
Kegiatan Pengembangan Kebun Karet Rakyat Tahun Anggaran 2019.....	10
Kegiatan Pengembangan Kebun Kopi Rakyat Tahun Anggaran 2019.....	10
Penyusunan Angka Tetap (Atap) Statistik Perkebunan Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 .....	11
Kopi Kalbar Laris Manis di AgroFood Expo 2019.....	12
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jadi Landasan Menata Perkebunan Rakyat .....	13
Lambatnya PSR Bukan Karena Banyaknya Persyaratan .....	14
Memperluas Plasma Wujudkan Swasembada Gula .....	15



## Perkebunan

### Pengarah

IR. FLORENTINUS ANUM, M.si

### Penanggung Jawab

I GUSTI AYU ISTANAWATI, API., MM

### Pemimpin Redaksi

AHMAD ZULFIKAR SP, MSI

### Redaksi

ASEANTY W PAHLEVI

### Design Grafis & Layout

IWAN SISWANTO

### Alamat Redaksi

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat  
Jl. Mujahidin No. 16 E-F, Pontianak,  
Kalimantan Barat

Telp/Fax : 0561-732642 / 0561766038  
email : disbunkalbar@gmail.com

Redaksi mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam penerbitan fokus perkebunan dengan mengirimkan artikel ataupun saran ke redaksi Fokus Perkebunan.



# Forum Koordinasi Perbenihan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



Kapuas Palace Hotel Pontianak, 11 April 2019

## Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Barat dan melakukan sinkronisasi rencana kerja pembangunan perkebunan antara pusat, provinsi dan kabupaten dilaksanakan forum perangkat daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019.

sasaran yg dicapai dengan adanya forum perangkat daerah adalah:

- \* terwujudnya sinergi dalam penyusunan rencana kerja sub sektor perkebunan tahun 2020, serta sinergi dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dan program tahun 2019.
- \* tersedianya bahan penyusunan renstra dinas perkebunan provinsi kalimantan barat dan rpjmd provinsi kalimantan.

**D**alam rangka meningkatkan koordinasi antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dengan instansi

pusat dan dinas yang menangani perkebunan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat serta menyamakan persepsi dan meningkatkan wawasan





## Program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)



4 Ir. Florentinus Anum, M.Si

Kelapa sawit memiliki peran penting dan strategis bagi ekonomi nasional dan daerah. Untuk Kalimantan Barat tercatat sampai dengan tahun 2017, luas kelapa sawit telah mencapai luas = 1.493.575 Ha (66,54%) dari total luas tanam komoditi perkebunan seluas = 2.244.603 Ha.

Kelapa sawit memiliki peran penting dan strategis bagi ekonomi nasional dan daerah. Untuk Kalimantan Barat tercatat sampai dengan tahun 2017, luas kelapa sawit telah mencapai luas = 1.493.575 Ha (66,54%) dari total luas tanam komoditi perkebunan seluas = 2.244.603 Ha.

Namun produktivitas kelapa sawit di Kalimantan Barat masih rendah = 2.141 kg/ha. Hal ini diduga karena kualitas/standar kebun masih rendah, khususnya kebun rakyat yang disebabkan karena:

1. Tanaman sudah tua (umur secara teknis kurang produktif) yaitu: tanaman berumur lebih dari 25 tahun (tahun tanam 1982 – 1993) yang cukup besar yaitu: ± 185.000 Ha.
2. Kurang pemeliharaan pada kebun-

kebun rakyat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar budidaya kelapa sawit (belum menerapkan pedoman Good Agriculture Practices/GAP).

3. Penggunaan benih tanaman kelapa sawit yang tidak bermutu.
4. Kurangnya dukungan prasarana dan sarana produksi pada kebun rakyat/petani pekebun.
5. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan petani, kelembagaan petani dalam mengakses sumber-sumber produksi pendukung usaha seperti: Perbankan/Keuangan, jejaring produksi dan teknologi berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit.

Sejalan dengan itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan kebijakan peremajaan kebun kelapa sawit pekebun yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan produksi dan produktivitas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Adapun dengan syarat utama untuk mengikuti kegiatan peremajaan ini adalah :

1. Tanaman berumur > 25 tahun dan atau
2. Produksinya < 10 ton/ha/tahun
3. Penggunaan benih kelapa sawit yang illegetiim

Melalui kegiatan ini petani dapat mengajukan permohonan peremajaan kebun kelapa sawit maksimal dengan luas 4 Ha/ 1KK. Adapun jumlah bantuan yang diberikan melalui pendanaan BPDPKS berupa hibah sebesar Rp. 25,000,000,- per hektar.

Potensi peremajaan kebun kelapa sawit berdasarkan umur tanaman > 25 tahun (Tahun 1982 – 1993).

Tahun 2018 Kalimantan Barat mendapat alokasi target peremajaan seluas 11.810 Ha dan sampai dengan Maret 2018 telah mendapat persetujuan melalui rekomendasi teknis Ditjenbun seluas 3.473.128 Ha (29,40%) dengan jumlah petani 1.399 KK. Persetujuan rekomtek tersebut tersebar di 2 Kabupaten yaitu; Kab Landak seluas 3.145.157 Ha dengan jumlah petani = 1.257 KK dan kab. Melawi seluas 3.279.704 dengan jumlah petani = 142 KK.

Berdasarkan realisasi persetujuan rekomtek untuk peremajaan seluas 3.473.128 Ha, dibutuhkan benih sebanyak = 520.970 batang ( 1 Ha = 150 Batang ).

Realisasi dana yang sudah dicairkan/ditransfer ke rekening petani sebesar Rp. 47.803.650.000,- untuk luas peremajaan 19.121.462 Ha, yang berasal dari 9 Koperasi/Pengusul di Kabupaten Landak.

Masih rendahnya capaian persetujuan rekomtek tahun 2018, antara lain disebabkan :

1. Penyempurnaan jumlah luas kebun dan KK petani yang diusulkan belum sesuai antara surat permohonan dan jumlah data dokumen yang ada/disampaikan.
2. Surat pernyataan Kepala Dinas Kabupaten untuk memproses/menerbitkan STDB harus dengan batas waktunya (maksimal 2 (dua) tahun).
3. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk fase TBM, belum sesuai/perlu perbaikan (range Rp. 45 juta – Rp. 55 juta). Perlu dievaluasi kembali untuk penyesuaiannya.

4. Surat pernyataan mengenai metode teknis peremajaan yang tidak sesuai dengan persyaratan/ketentuan yaitu tumbang serentak.
5. Pengusul yang belum dapat menyertakan dokumen kemitraan kegiatan dengan pihak ketiga/mitra, terkait dengan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit pekebun (penyiapan lahan/LC, penyediaan benih yang bermutu dan pengolah hasil serta penjamin dana kelanjutan kegiatan).
6. Belum semua dokumen usulan peremajaan dilengkapi dengan peta polygon menurut lahan.
7. Surat keterangan lahan bebas kawasan hutan/hidrologis gambut (kawasan terlarang lainnya) dari instansi yang berwenang.
8. Surat keterangan kepemilikan lahan (BBN) dari instansi yang berwenang.

Oleh karena itu, untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan peremajaan kelapa sawit di Kalimantan Barat sangat diharapkan kesungguhan dan keseriusan Tim Verifikasi Kabupaten dan Calon Petani dalam menyiapkan usulan secara lengkap dan benar sesuai persyaratan, sehingga proses verifikasi untuk mendapat persetujuan/penetapan rekomendasi teknis di tingkat Provinsi dan DITJENBUN berjalan dengan lancar.

Demikian paparan singkat (Bapak Ir. Florentinus Anum, M.Si) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun saat review kegiatan peremajaan baru-baru ini di Pontianak.

No	Kabupaten	Potensi Kebun Plasma (Ha)
1	Sambas	1.642
2	Bengkayang	700
3	Landak	7.998
4	Sanggau	3.446
5	Sekadau	3.500
6	Sintang	11.740
7	Melawi	2.000
8	Ketapang	6.308
	<b>Jumlah</b>	<b>37.334</b>



# Konsolidasi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Pada Lahan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019



**K**egiatan konsolidasi pencegahan dan pengendalian kebakaran pada lahan perkebunan ini dilaksanakan di Hotel Merpati Pontianak, selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 29 April 2019.

Kegiatan ini bertujuan sebagai berikut :

- Memberikan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Pertanian terbaru tentang Pembukaan Lahan Tanpa Bakar
- Menyampaikan hasil inventarisasi hotspot sepanjang tahun 2018 dan menemukan langkah-langkah untuk menekan angka hotspot dan angka kejadian kebakaran lahan dan ke-

bun di tahun 2019

- Menyampaikan informasi perkiraan iklim dan cuaca sepanjang tahun 2019 dan sejauh mana penggunaannya dapat efektif menekan kejadian kejadian kebakaran pada lahan dan kebun di Prov. Kalbar
- Memperkuat sinergitas masing-masing sektor sesuai dengan tupoksi dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran pada lahan dan kebun.
- Meningkatkan kewaspadaan perusahaan untuk mencegah terjadinya kebakaran baik dalam konsesi perusahaan perkebunan maupun area disekitarnya.

Peserta kegiatan adalah 150 orang

yang terdiri dari PNS OPD Provinsi Kalimantan Barat, PNS OPD yang membidangi perkebunan di Kab/Kota, Asosiasi Perkebunan dan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat.

Narasumber pada kegiatan tersebut sebagai berikut :

- Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dengan materi yang disampaikan berjudul sosialisasi Permentan No 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar serta Tanggung Jawab dan Kewajiban Perusahaan terkait peraturan.

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan materi yang disampaikan berjudul pemetaan kawasan rawan bencana asap akibat kebakaran lahan dan kebun.
- Kepala Bidang Pengendalian Perubahan Iklim, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dengan materi yang disampaikan berjudul upaya mitigasi dan adaptasi kebakaran pada lahan dan kebun
- Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas II Mempawah Kalimantan Barat dengan materi yang disampaikan berjudul manfaat informasi iklim dan cuaca dalam menekan kejadian kebakaran pada lahan dan kebun serta informasi prakiraan iklim sepanjang tahun 2019

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sejak tahun 2018 Permentan No. 47/Permentan/OT.140/4/2014 dinyatakan tidak berlaku dan digantikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/I/2018 tentang

Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar

2. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan perkebunan, yaitu :
  - membuat RKPPLP bagi perusahaan yang akan atau masih melakukan pembukaan lahan
  - kegiatan pembukaan dan pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan cara manual maupun teknis tanpa membakar biomassa sisa pembersihan
  - perusahaan wajib membentuk satgas yang terdiri dari kepala, sekretaris, penanggung jawab urusan pencegahan, pemadaman dan logistik serta regu pemadam
  - regu pemadam terdiri dari regu inti dan regu pendukung yang terdiri dari karyawan perusahaan kebun sedangkan regu perbantuan terdiri dari masyarakat
  - jumlah regu pemadam harus menyesuaikan dengan luas IUP perusahaan. Demikian pula jumlah dan item perlengkapan regu pintu pemadam
  - untuk lahan perkebunan yang seluruhnya dalam kawasan APL wajib mematuhi standar di Permentan No 05/Permentan/

KB.410/1/2018 sementara jika dalam lokasi perkebunan menggunakan lahan diluar APL maka dapat juga menggunakan peraturan yang sesuai dengan status lahan tersebut.

3. Terdapat 182 desa/kelurahan yang berpotensi tinggi terhadap kebakaran hutan, lahan dan kebun.
4. Seluruh perusahaan wajib memiliki dan melaksanakan Pergub Kalbar Nomor 103/2009 tentang PROTAP mobilisasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Prakiraan awal musim kemarau akan mulai dirasakan mulai dasarian ke II Bulan Juli, sementara puncak musim kemarau akan terjadi pada Bulan Agustus dan diperkirakan masih dalam kondisi normal.
6. Prakiraan sifat hujan bulanan tahun 2019, diperkirakan pada Bulan Mei masih bersifat normal sedangkan untuk Bulan Juni - Oktober 2019 sifat hujan cenderung di bawah normal.
7. Upaya mitigasi dan adaptasi kebakaran lahan yang dilakukan oleh DPRKPLH berupa proklamasi, program BRG dan desa peduli gambut yang dapat digunakan perusahaan sebagai inspirasi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan untuk memberdayakan atau melibatkan masyarakat sekitar di dalamnya.







## *Pertemuan Koordinasi Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (TKP3) dan Petugas Lapangan Pembantu Tenaga Kontrak Pendamping Pembangunan Perkebunan (PLP-TKP3)*





# Harga Produk Kelapa Sawit Tahun 2019

BULAN	PERIODE	INDEKS "K" (%)	HARGA C.P.O (RP/KG)	HARGA INTI SAWIT (RP/KG)	HARGA TBS/KG BERDASARKAN UMUR TANAMAN (TAHUN)																	RATA-RATA TAHUN 2019		PERSENTASE NAIK/TURUN (%)
					3	4	5	6	7	8	9	10-20	21	22	23	24	25	18	19					
JAN	I	84,57	5.876,95	4.192,91	932,23	996,84	1.065,21	1.098,65	1.138,54	1.174,40	1.194,13	1.247,58	1.225,64	1.220,03	1.190,70	1.150,44	1.112,67	1.183,60	Naik	8,98				
	II	84,57	6.266,97	4.210,29	985,30	1.054,04	1.126,68	1.162,05	1.204,15	1.242,32	1.263,34	1.319,14	1.295,66	1.289,65	1.258,38	1.215,45	1.175,17	1.251,42	Naik	5,73				
FEB	I	87,47	6.418,33	4.263,85	1.042,02	1.114,80	1.191,70	1.229,11	1.273,62	1.314,04	1.336,31	1.395,19	1.370,29	1.363,93	1.330,80	1.285,33	1.242,66	1.323,55	Naik	5,76				
	II	87,47	6.713,94	3.923,53	1.071,28	1.147,09	1.226,96	1.265,49	1.311,11	1.353,25	1.376,50	1.435,55	1.409,32	1.402,62	1.367,97	1.320,40	1.275,77	1.361,69	Naik	2,88				
MAR	I	86,92	6.635,29	3.664,33	1.044,68	1.119,00	1.197,22	1.234,81	1.279,24	1.320,57	1.343,38	1.400,38	1.374,54	1.367,94	1.333,91	1.287,20	1.243,37	1.328,26	Turun	(2,45)				
	II	86,92	6.546,74	3.406,83	1.023,50	1.096,70	1.173,66	1.210,52	1.254,00	1.294,72	1.317,21	1.372,46	1.346,90	1.340,37	1.306,79	1.260,70	1.217,45	1.301,72	Turun	(2,00)				
APR	I	85,74	6.470,28	3.435,99	1.000,17	1.071,58	1.146,68	1.182,69	1.225,19	1.264,91	1.286,84	1.341,03	1.316,13	1.309,77	1.277,04	1.232,10	1.189,94	1.271,93	Turun	(2,29)				
	II	85,74	6.678,61	3.353,88	1.025,78	1.099,37	1.176,69	1.213,64	1.257,19	1.298,13	1.320,75	1.375,79	1.350,03	1.343,45	1.309,66	1.263,28	1.219,76	1.304,85	Naik	2,59				
MEI	I	86,39	6.458,96	3.107,36	994,87	1.066,50	1.141,70	1.177,55	1.219,75	1.259,61	1.281,64	1.334,84	1.309,49	1.303,06	1.270,14	1.224,94	1.182,54	1.265,78	Turun	(2,99)				
	II	86,39	6.127,12	3.220,91	953,17	1.021,29	1.092,91	1.127,23	1.167,73	1.205,61	1.226,54	1.278,09	1.254,32	1.248,25	1.217,02	1.174,14	1.133,91	1.212,22	Turun	(4,23)				
JUN	I	85,35	6.181,83	3.168,53	947,34	1.015,19	1.086,50	1.120,62	1.160,85	1.198,59	1.219,44	1.270,45	1.246,73	1.240,67	1.209,54	1.166,80	1.126,71	1.204,95	Turun	(0,60)				
	II	85,35	6.146,75	3.020,74	937,55	1.004,93	1.075,70	1.109,48	1.149,26	1.186,76	1.207,48	1.257,60	1.233,98	1.227,94	1.196,98	1.154,49	1.114,62	1.192,73	Turun	(1,01)				
JUL	I	85,15	6.088,66	3.097,35	930,08	996,74	1.066,78	1.100,28	1.139,77	1.176,86	1.197,34	1.247,35	1.224,04	1.218,08	1.187,50	1.145,50	1.106,10	1.183,04	Turun	(0,81)				
	II	85,15	5.892,70	2.901,58	896,89	961,34	1.029,03	1.061,34	1.099,40	1.135,27	1.155,08	1.203,04	1.180,45	1.174,68	1.145,07	1.104,43	1.066,29	1.140,99	Turun	(3,55)				
AGT	I	85,56	5.969,82	2.830,75	909,28	974,83	1.043,62	1.076,40	1.114,95	1.151,43	1.171,60	1.219,92	1.196,88	1.190,99	1.160,86	1.119,49	1.080,67	1.156,96	Naik	1,40				
SEP	I																							
	II																							
OKT	I																							
	II																							
NOV	I																							
	II																							
DES	I																							
	II																							

# Kegiatan Pengembangan Kebun Karet Rakyat Tahun Anggaran 2019

**T**anaman karet merupakan salah satu komoditi unggulan daerah yang memiliki arti penting bagi masyarakat Kalimantan Barat. Pengembangan karet di Kalimantan Barat memiliki arti penting dan strategis karena menyangkut sebagian besar masyarakat di pedesaan dan merupakan salah satu tiang penyangga perekonomian daerah.

Berdasarkan data statistic Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2017, luas tanaman karet tercatat 605.979 Ha, terdiri dari tanaman muda 184.126 Ha, tanaman menghasilkan 337.840 Ha dan tanaman tua/rusak 84.013 Ha. Produksi karet sebanyak 273.865

ton/tahun dengan produktivitas rata-rata 811 kg/Ha/tahun dengan melibatkan petani sebanyak 321.214 petani pekebun/KK.

Berdasarkan data yang ditunjukkan diatas terlihat bahwa tanaman tua/rusak cukup tinggi yakni sebesar 84.013 Ha atau 13,86% terhadap luas total areal tanaman karet yaitu 605.979 Ha. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peremajaan tanaman untuk mempertahankan tingkat produksi karet di Kalimantan Barat. Selain itu perlu juga dilakukan fasilitasi pemberian pupuk atau sarana produksi lainnya yang mendukung pengembangan tanaman karet sehingga sesuai dengan pedoman Good Agriculture Practices (GAP).

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, mutu serta nilai tambah usaha budidaya karet dan meningkatkan produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan industry berbahan baku karet.

Hasil dari kegiatan ini yaitu terbangunnya kebun karet rakyat melalui pengembangan seluas 100 Ha yang terdiri dari 50.000 batang benih karet dan 11.900 Kg Pupuk NPK yang tersebar di kabupaten Mempawah, Sintang dan Melawi. Kendala di lapangan untuk Kabupaten Melawi hasil verifikasi terdapat lokasi yang merupakan kawasan hutan. Kemudian untuk tindak lanjutnya lokasi pengembangan akan dipindahkan ke lokasi lain.

# Kegiatan Pengembangan Kebun Kopi Rakyat Tahun Anggaran 2019

**B**erdasarkan data statistic Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017, luas areal kebun kopi rakyat tercatat 11.580 Ha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 20.490 orang petani. Dalam perekonomian nasional, komoditas kopi mengambil peran cukup penting untuk menjadi sumber pendapatan utama.

Dengan kondisi geografis,

Kalimantan Barat yang cocok untuk budidaya kopi apabila dikelola dengan baik dapat membuka peluang Kalimantan Barat menjadi daerah yang mampu memasok kebutuhan kopi baik tingkat nasional maupun untuk kebutuhan ekspor. Melihat data statistic perkebunan, luasan tanaman kopi di Kalimantan Barat jumlah tanaman tua/rusak cukup besar sehingga perlu adanya rehabilitasi tanaman kopi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan areal produktivitas tanaman kopi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terjadi peningkatan luas tanaman kebun kopi petani, produksi dan produktivitas di daerah sentra. Kemudian harapan kebun kopi di Kalimantan Barat dengan target kinerja dalam daftar table di bawah ini :

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Captain Program	Meningkatnya produksi komoditas	
Keluaran	Terbangunnya kebun kopi rakyat sesuai standar teknis	90 Ha/90.000 Batang
Hasil	Terlaksananya pengembangan kebun kopi rakyat	100%





## PENYUSUNAN ANGKA TETAP (ATAP) STATISTIK PERKEBUNAN TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

**B**erdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 2014 bahwa tujuan pembangunan perkebunan secara ekonomi berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktifitas dan kualitas serta nilai tambah saing dan pangsa pasar, meningkatkan memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industry dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumberdaya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam rangka terus meningkatkan peranan sub sektor perkebunan dalam pembangunan nasional, diperlukan dukungan penyediaan data yang akurat dan tepat waktu. Untuk itu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat secara rutin setiap tahun melakukan sinkronisasi data untuk menyamakan persepsi antara Propinsi dan Kabupaten agar diperoleh data yang digunakan

untuk merumuskan/menentukan arah kebijakan maupun memenuhi kebutuhan data seluruh stakeholders dalam pembangunan perkebunan.

Data dan informasi yang ada harus memenuhi kriteria sahih (valid), terandalkan (reliable), mutakhir (up to date), obyektif (objective) dan konsisten (consistent). Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan perkebunan saat ini dan masa mendatang yang semakin kompleks, maka perlu adanya dukungan data dan informasi yang memenuhi kriteria dimaksud. Guna menunjang pemenuhan kebutuhan data dan informasi tersebut, khususnya tentang luas areal dan produksi perkebunan, pada saat ini perlu disusun suatu database atau basis data luas areal, produksi perkebunan dan jumlah petani yang terlibat dalam pembangunan perkebunan.

Tujuan dilaksanakan Penyusunan Angka Tetap (ATAP) Statistik Perkebunan Tahun 2018, adalah :

- \* Memperoleh Angka Tetap Tahun 2018 per komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota. Untuk menghitung Angka Tetap

diperlukan kesamaan pemahaman dan metode yang representative.

- \* Untuk memperoleh satu kesatuan data yang valid, akurat dan objektif sesuai dengan acuan buku pedoman pelaksanaan.
- \* Tersedianya publikasi data statistik perkebunan yang akurat, terkini dan lengkap secara rutin setiap tahun.
- \* Mendapatkan informasi tentang data yang akurat dan tepat waktu (data luas areal produksi komoditas perkebunan)
- \* Menuju satu angka statistik perkebunan dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

Penyusunan Angka Tetap Statistik Perkebunan Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 9-11 April 2019 di Hotel Mahkota Jl. Sidas No. 8 Pontianak, dan melibatkan instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat setelahnya Penyusunan Angka Tetap Statistik Perkebunan Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Barat akan dilakukan sinkronisasi dan validasi data di Tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).



## Kopi Kalbar Laris Manis di AgroFood Expo 2019

Pameran 19th AgroFood Expo 2019 merupakan kegiatan rutin setiap tahun dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang saat ini dilanjutkan oleh Dirjen Perkebunan Direktorat Jenderal Pengolahan Hasil Perkebunan yang pada umumnya diikuti oleh pelaku usaha dibidang pertanian, perkebunan Dinas /Badan Pertanian, Perkebunan dan Perkebunan seluruh Indonesia Pelaku Usaha Kecil dan Menengah /UKM/IKM.

**P**ameran 19th Indonesia AgroFood Expo 2019, akan menjadi kesempatan yang sangat baik dan strategis bagi para produsen dan pengusaha Indonesia, untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk olahannya sekaligus membangun jaringan bisnis dengan relasi baru, guna memperluas pangsa pasar, menambah wawasan, mencari inspirasi serta memahami keinginan dan selera pembeli.

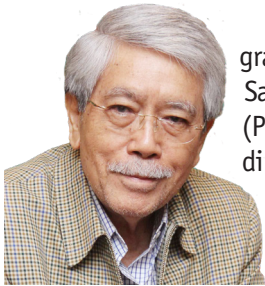
Dalam upaya memperkenalkan serta mengangkat salah satu komoditi asli Kalimantan Barat di ajang nasional, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat mengusung konsep kedai kopi kekinian dalam Pameran 19th Indonesia AgroFood Expo 2019 dengan mengikutsertakan pelaku usaha kopi liberika sebagai salah satu produk kopi unggulan yang ada di Kalimantan Barat.

Respon terhadap produk olahan perkebunan seperti brown sugar/ gula semut baik yang berbahan dasar kelapa maupun aren sangat diminati karena berdasarkan hasil penelitian gula ini sangat baik untuk kesehatan terutama bagi penderita diabetes. Kemudian produk olahan coklat, kopi asal Kalbar (Liberika Kayong Utara) cukup diminati karena memiliki aroma dan cita rasa yang khas.

(KOJAL : Kopi Jago Jalanan).



# Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) jadi Landasan Menata Perkebunan Rakyat



Bungaran Saragih

JAKARTA. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi fondasi baru pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat. Karena

itu, program PSR tidak hanya semata-mata menggantikan tanaman tua dengan tanaman baru, tapi juga erat terkait dengan peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih mengatakan, dengan konsep di atas, maka ada banyak hal yang harus dibenahi dengan program PSR. Karena program ini bukan sekedar menggantikan tanaman tua dengan tanaman muda, tapi juga menata perkebunan rakyat.

“Kita harus berpikir skala makro dan bukan hanya skala mikro,” ujar Bungaran dalam seminar nasional dengan tema “Seriuskah Program Peremajaan Sawit Rakyat?” yang dilaksanakan Media Perkebunan, Rabu (10/7).

Lebih lanjut, Bungaran memaparkan, bila konsep PSR yang digagas itu dilaksanakan, maka dalam program PSR pemerintah harus men-design tanaman sawit rakyat tersebut. Sebab bila pemerintah tidak benar-benar membenahi tanaman sawit perkebunan rakyat, maka akan terus menjadi masalah dalam beberapa tahun mendatang, meskipun pemerintah telah melakukan peremajaan.

“Saya melihat ini salah satu strategi pemerintah untuk mensinkronkan pemerintah pusat dengan daerah. Atas dasar itulah presiden turun langsung ke bawah untuk membenahinya. Ini dilakukan agar sawit rakyat naik kelas dan lebih berkelanjutan,” ucap Bungaran.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kemtant), Antarjo Diki, sependapat dengan Bungaran. Ia mengatakan, dengan



melakukan PSR ini maka akan ada banyak hal yang terbenahi.

Ia mengambil contoh pada era 1980-an ada banyak lahan terlantar yang sulit untuk dibudidayakan untuk pertanian. Lalu masuklah tanaman kelapa sawit yang mampu mengubah ekonomi masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang sudah 30 tahun menetap di sana dan hidup dari kelapa sawit.

“Dari yang tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan sekelas pejabat dan bisa menunaikan ibadah haji semua itu karena kelapa sawit,” kata Antarjo.

Melihat fakta tersebut, Antarjo mengakui, bahwa tanaman kelapa sawit telah mengubah ekonomi masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat yang merasakan dampak ekonominya, tapi juga pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Dari kelapa sawit daerah-daerah tumbuh dan berkembang dan itu bukti nyata,” tutur Antarjo. Namun, ia menuturkan dengan berkembangnya kelapa sawit rakyat ini, negara luar dalam hal ini Eropa merasa terganggu. Padahal negara Eropa juga melakukan hal yang sama sebelum menjadi seperti saat ini.

“Eropa hanya ingin menang sendiri, padahal dia sendiri untuk menjadi negara maju juga melakukan hal yang sama. Apakah yang dia lakukan pola sustainable?” Tanya Antrajo.

Meski begitu, Antrajo mengakui bahwa permintaan akan produk kelapa sawit masih tinggi. Tapi tetap harus dibenahi agar tidak ada celah untuk memojokan produk kelapa sawit.

Pengamat Perkebunan Gamal Nasir, membenarkan bahwa pertumbuhan kelapa sawit rakyat cukup pesat karena memang memberikan banyak manfaat, dan itu sudah terbukti.

Berdasarkan catatan Ditjen Perkebunan Keman 2017, dari luas perkebunan kelapa sawit 12,30 juta hektare, yang dimiliki oleh rakyat atau petani mencapai 4,75 juta hektare.

Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan 1979, di awal perkebunan rakyat, dimana total luas perkebunan kelapa sawit hanya 260.939 hektare dan yang dimiliki oleh petani seluas 3.125 hektare. “Artinya program PSR ini sangatlah berat jika tidak dilakukan dengan bersungguh-sungguh,” terang Gamal. Target PSR tahun 2019 ini yaitu 200.000 hektar. [kontan.co.id](http://kontan.co.id)





## Lambatnya PSR Bukan Karena Banyaknya Persyaratan

JAKARTA, – Lambatnya program peremajaan sawit rakyat (PSR) selama ini ternyata bukan karena banyaknya persyaratan. Namun justru berkurangnya persyaratan malah tidak menguntungkan petani.

“Inti permasalahan bukan karena persyaratan, justru dengan berkurangnya persyaratan, tidak menguntungkan bagi petani dan syarat yang dihapus bukanlah kewajiban petani melainkan tugas aparat Pembina di daerah untuk membantu,” ujar Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Pengembangan Bio Industri Bambang kepada [perkebunannews.com](http://perkebunannews.com).

Contohnya, kata Bambang, dengan dihapusnya syarat

rekomendasi dari dinas kehutanan tentang status lahan, berarti membiarkan lahan sawit petani tetap dalam masalah dengan kehutanan. Hal ini tidak dapat ditindak lanjuti untuk memperoleh sertifikat ISPO.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan dari 5,6 juta hektar (Ha) sawit rakyat terdapat lebih dari 1,8 juta Ha berada dalam Kawasan hutan. “Kejadian di Musi Banyuasin dari 4.444 hektar lahan PSR yang diusulkan seluruhnya sertifikat hak milik ternyata diketahui terdapat 1.600 hektar di antaranya berada dalam Kawasan hutan yang akhirnya Menteri KLHK menyetujui untuk pelepasannya,”

terang Bambang yang juga mantan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Selain itu, lanjut Bambang, dengan dihilangkannya syarat rencana anggaran biaya (RAB), ini juga tugas aparat Pembina di daerah untuk membantu dan bukan petani sendiri yang menyiapkan.

Pembatasan RAB untuk replanting sawit rakyat maksimum berdasarkan hasil perhitungan para pakar senilai Rp 60 juta per Ha. “Ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya mark up yang berpotensi membebani utang petani terlalu besar,” jelas Bambang yang juga mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Provinsi Sulawesi Tenggara. (YIN/YR)





# Memperluas Plasma Wujudkan Swasembada Gula

JAKARTA, – Target Pemerintah mewujudkan swasembada gula tahun 2024 mendatang terus dilakukan. Salah satunya memperluas lahan plasma di luar pulau Jawa. Karena potensi lahan yang masih besar.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyo, mengatakan, salah satu terobosan untuk mencapai swasembada gula yaitu dengan memperluas lahan plasma di luar pulau Jawa. Pemilihan areal pengembangan tebu di luar pulau Jawa dikarenakan potensi lahan di luar pulau Jawa masih besar.

Saat ini pengembangan areal plasma sudah mulai dilakukan di

provinsi Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan. “Pemerintah akan membantu dalam perluasan areal plasma melalui penyediaan lahan, pembersihan lahan, pemberian bantuan benih dan pupuk, serta bimbingan teknis,” tutur Kasdi di Jakarta, Jumat (20/9).

Kasdi juga menyampaikan, pemerintah akan bekerjasama dengan perusahaan yang berada di sekitar areal pengembangan plasma terkait pemberian bimbingan teknis kepada calon petani yang akan melakukan usaha budidaya tebu di lahan tersebut.

Kasdi menyebutkan, kebutuhan gula konsumsi atau gula putih sebanyak 2,8 juta ton yang dipenuhi dengan produksi nasional sebesar 2,5 juta ton dan melalui impor sebesar 300 ribu ton. Kebutuhan konsumsi gula diperkirakan 2,8 juta ton akan terpenuhi.

“Kita punya rencana investasi sebagai arahan Bapak Menteri Amran yaitu dengan tambahan 15 pabrik gula yang akan kita bangun pada periode 2020 sampai dengan 2024 untuk memenuhi kebutuhan gula industri sebanyak 3,2 juta ton dapat dipenuhi pada 2029,” tutur Kasdi. (YR)



